

Evaluasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Pengelolaan Aset Daerah dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan

Evaluation of the Regional Management Information System (SIMDA) Application in Regional Asset Management to Support Health Services

Yohanes Tomy Vandeo Cardo Saragih^{1*}, Felix Kasim², Sri Melda Br Bangun³

^{1,2,3}Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam

Jalan Sudirman No. 38 Lubuk Pakam

Email: saragihjo@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Pengelolaan aset daerah berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang optimal, terutama melalui penerapan aplikasi berbasis teknologi seperti SIMDA Barang. Namun, implementasi sistem ini di Kabupaten Asahan masih menghadapi kendala pada aspek SDM, infrastruktur, dan integrasi data, sehingga efektivitasnya belum maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan SIMDA BMD untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan dan strategi peningkatan pengelolaan aset secara digital di sektor kesehatan. **Tujuan:** mengevaluasi pengelolaan aset daerah dengan aplikasi SIMDA dalam mendukung pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan. **Metode penelitian:** penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi kasus untuk memfokuskan kajian pada satu unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, sebagai representasi pengelolaan aset daerah melalui aplikasi SIMDA. **Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil penelitian yang berfokus pada sistem pengendalian, mekanisme pengelolaan, dan prosedur pencatatan barang milik daerah dengan aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penerapan SIMDA telah membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah. Sistem pengendalian internal berjalan cukup baik melalui proses verifikasi, pencatatan, dan pelaporan yang dilakukan secara elektronik sesuai regulasi. Namun demikian, efektivitas sistem masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, keterbatasan infrastruktur jaringan, serta belum optimalnya integrasi data antarunit kerja. **Kesimpulan:** Penggunaan SIMDA telah meningkatkan transparansi dan tertib administrasi aset, namun masih perlu penguatan SDM, koordinasi, pelatihan rutin, serta evaluasi berkala. Selain itu, optimalisasi dan integrasi SIMDA dengan sistem keuangan dan pengadaan diperlukan agar pengelolaan aset lebih cepat, akurat, dan transparan.

Kata Kunci: SIMDA; Pengelolaan Aset Daerah; Pelayanan Kesehatan; Dinas Kesehatan

Abstract

Background: Regional asset management plays an important role in supporting effective governance and optimal public services, particularly through the implementation of technology-based applications such as SIMDA Barang. However, the implementation of this system in Asahan Regency still faces challenges in terms of human resources, infrastructure, and data integration, so its effectiveness has not been fully maximized. Therefore, a comprehensive evaluation of the implementation of SIMDA BMD is needed to identify success factors and strategies for improving digital asset management in the health sector. **Objective:** To evaluate regional asset management using the SIMDA application in supporting health services at the Asahan Regency Health Office. **Research Method:** This study used a qualitative research approach. The research design applied was a case study, focusing on a single organizational unit, namely the Asahan Regency Health Office, as a representation of regional asset management through the SIMDA application. **Research Results:** Based on the findings focusing on the control system, management mechanisms, and recording procedures of regional assets using the SIMDA application at the Asahan Regency Health Office in 2025, it can be concluded that the implementation of SIMDA has helped improve efficiency, accuracy, and accountability in regional asset management. The internal control system has functioned fairly well through electronic verification, recording, and reporting processes in accordance with regulations. However, system effectiveness is still influenced by human resource factors, limited network infrastructure, and suboptimal data integration among work units. **Conclusion:** The use of SIMDA has improved transparency and orderly asset

*Corresponding Author: Yohanes Tomy Vandeo Cardo Saragih, Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, Deli Serdang, Indonesia

E-mail : saragihjo@gmail.com

Doi :

Received : February 28, 2026. Accepted: April 23, 2026. Published: April 30, 2026

Copyright (c) 2026 : Yohanes Tomy Vandeo Cardo Saragih. Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International

administration, but further strengthening of human resources, coordination, routine training, and periodic evaluation is still needed. In addition, optimization and integration of SIMDA with financial and procurement systems are required so that asset management can be faster, more accurate, and more transparent.

Keywords: *SIMDA; Regional Asset Management; Health Services; Health Office.*

1. PENDAHULUAN

Aset milik daerah memiliki peranan krusial untuk pemerintahan, kemajuan, pemberdayaan, serta layanan kepada masyarakat lainnya [1]. Cara mengelola aset milik daerah menunjukkan penerapan prinsip pengelolaan pemerintahan yang tepat. Sebab itu, pengelolaan mesti dilaksanakan tepat juga mengikuti prinsip-prinsip seperti fungsi yang jelas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, tanggung jawab, dan kepastian nilai baik. Untuk memenuhi tugas juga fungsi pemerintah daerah selaku penyedia layanan publik, aset pemerintah daerah harus dikelola secara memadai dan akurat. Untuk memastikan bahwa pengelolaan barang milik lokal berjalan baik juga tepat, persamaan pandangan juga tindakan [2]. Dalam rangka peningkatan pelayanan tersebut tentunya aset milik pemerintah merupakan unsur vital untuk mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Hal ini tentunya lebih penting lagi bagi pemerintah daerah manakala era otonomi daerah tengah digalakkan [2]. Pengelolaan aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan aset [3]. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya seiring waktu [3].

Karakteristik pemilikan barang milik pemerintah, antara lain pengadaannya tidak selalu melalui melainkan kegiatan merupakan procurement aset pemerintah ada [4]. Sejalan dengan konsep clean government, maka pengelolaan barang milik negara dan daerah perlu diarahkan kepada fungsi kebermanfaatannya bagi publik semaksimal mungkin [5]. Oleh karena itu, barang daerah harus dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif berdasarkan prinsip akuntabilitas publik [5]. Sehubungan dengan hal itu, terdapat beberapa pengaturan oleh pemerintah mengenai pengelolaan barang guna pencapaian tujuan otonomi daerah [22]. Pengaturan oleh pemerintah tersebut terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [23]. Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah dimaksud, kemudian diterbitkan secara khusus kebijakan teknis dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, di dalamnya mengatur antara lain mengenai kewenangan, tugas dan fungsi pengelola, pengguna kuasa barang, dan kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Menurut [8] permasalahan pengelolaan aset tidak jarang ada di pemerintah daerah adalah terdapat barang daerah yang belum ditulis, properti daerah lama masih tercatat, dan properti daerah yang ditulis tetapi tiada terdukung oleh dokumen kepemilikan sah karena volume aset tetap dan data pencatatan yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Penelitian sebelumnya sebelumnya yang melihat faktor-faktor yang dianggap memengaruhi optimalisasi pengelolaan aset daerah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian [9]. Mereka menemukan bahwa elemen seperti perencanaan, identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pengendalian berdampak signifikan ke maksimalisasi pengelolaan aset [6]. Pengelolaan aset atau barang milik daerah merupakan bagian krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dituntut memiliki sistem pengelolaan dan pengendalian barang milik daerah yang akuntabel, transparan, serta mampu menyediakan data dan informasi secara cepat dan tepat [7]. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset [8].

Secara prinsip, penggunaan aplikasi SIMDA Barang bertujuan untuk memudahkan proses administrasi, mempercepat pencatatan, mengurangi kesalahan input manual, serta memperkuat akuntabilitas data aset [9,10]. Sistem ini diharapkan mampu mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, mutasi, hingga pelaporan barang milik daerah secara real-time dan berbasis regulasi, seperti yang diatur dalam PSAP No. 7 dan PSAK No. 16. Namun, dalam implementasinya di lapangan, termasuk di Dinas Kesehatan unit pelayanan kesehatan lainnya. Kabupaten Asahan, masih ditemukan sejumlah kendala. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya proses input data, kurangnya pelatihan SDM operator, infrastruktur jaringan yang belum memadai, serta belum terintegrasinya pelaporan antara unit pengguna dengan bidang aset. Kendala tersebut terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengarsipan, rotasi aset, hingga pencatatan dan pelaporan, sehingga menyebabkan sistem belum berjalan optimal dan perlu dievaluasi [11].

Padahal, komitmen pemerintah daerah terhadap pengelolaan aset yang baik sudah mulai terlihat. Kabupaten Asahan sendiri berhasil meraih Peringkat I kategori Pemerintah Daerah Terinisiatif dalam Penilaian Barang Milik Daerah pada ajang Kekayaan Negara Awards 2024 yang diselenggarakan oleh DJKN Wilayah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan adanya semangat reformasi tata kelola aset, termasuk di sektor kesehatan, yang menjadi prioritas utama pelayanan publik. Jika dibandingkan dengan daerah yang telah menerapkan SIMDA secara efektif, seperti Kabupaten Sleman, terlihat adanya dampak positif yang signifikan. Setelah implementasi SIMDA BMD, aset dalam kondisi baik meningkat dari 58% menjadi 75%, biaya pemeliharaan turun hingga 22%, dan pengaduan terkait kerusakan aset menurun sebesar 40% [12].

Keberhasilan ini didukung oleh kesiapan SDM, infrastruktur jaringan, serta integrasi sistem yang baik antara pengadaan, keuangan, dan aset. Perbandingan ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dan manajemen aset merupakan kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, khususnya di sektor kesehatan. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan SIMDA BMD di daerah seperti Kabupaten Asahan menjadi penting untuk mengidentifikasi faktor keberhasilan, tantangan, serta strategi optimalisasi pengelolaan aset berbasis digital dalam konteks pelayanan publik [13].

Sebaliknya, di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Batang dan Lombok Timur, penerapan SIMDA masih menghadapi tantangan. Di Kabupaten Batang, aplikasi SIMDA BMD belum mendukung pelaporan berdasarkan sumber dana, masih berjalan secara offline, dan belum [14]. Permasalahan yang umum dijumpai mencakup lemahnya infrastruktur TI, minimnya pelatihan, serta belum adanya budaya kerja digital yang kuat. Sebagai pembanding internasional, negara seperti Selandia Baru telah mengimplementasikan sistem manajemen aset berbasis digital yang terintegrasi secara nasional. Sistem yang digunakan oleh lembaga kesehatan seperti Health New Zealand (Te Whatu Ora), maupun penyedia layanan digital seperti Orion Health, memungkinkan pengelolaan aset dilakukan secara real-time, berbasis cloud, dan terhubung langsung dengan sistem keuangan dan pelayanan. Sistem ini tidak hanya mencatat data aset, tetapi juga mampu merencanakan pemeliharaan, menilai usia ekonomis, serta mengukur dampak aset terhadap pelayanan publik [15,16].

Permasalahan di tempat penelitian dapat diuraikan bahwa meskipun penggunaan aplikasi SIMDA telah diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, masih terdapat kendala dalam optimalisasi pengelolaan aset, seperti keterbatasan kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem, belum optimalnya infrastruktur dan pembaruan sistem, kurangnya integrasi data antarunit, serta belum konsistennya monitoring dan evaluasi, sehingga berdampak pada efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan aset yang belum maksimal. Berdasarkan paparan di atas, terlihat bahwa penggunaan aplikasi pengelolaan aset seperti SIMDA dapat memberikan manfaat besar apabila ditunjang oleh SDM yang kompeten, infrastruktur yang memadai, serta komitmen kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, penting dilakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIMDA Barang di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2025, untuk melihat sejauh mana sistem ini telah membantu dalam mendukung pengelolaan aset yang efisien, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.

2. METODE

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset daerah dalam mendukung pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2025. Studi kasus memungkinkan peneliti memfokuskan kajian pada satu unit organisasi, yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, khususnya dalam pengelolaan aset melalui aplikasi SIMDA.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen administratif. Penelitian ini juga mengintegrasikan teori utilitas Jeremy Bentham sebagai kerangka konseptual untuk menilai manfaat sistem pengelolaan aset terhadap efektivitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran komprehensif serta rekomendasi strategis untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset melalui SIMDA.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan pada April–Agustus 2025. Lokasi dipilih karena peran strategisnya dalam pelayanan kesehatan melalui Puskesmas, laboratorium, dan unit pelayanan lainnya, serta karena institusi ini mengelola aset publik yang besar dan beragam sehingga berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan.

Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan pendekatan homogeneous sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan utama dalam penelitian ini meliputi Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, pejabat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Asahan, Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan, Kepala Puskesmas, serta Pengurus Barang Puskesmas yang terlibat langsung dalam pengelolaan aset daerah.

Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan menggunakan panduan wawancara untuk menggali informasi secara komprehensif terkait pengelolaan aset daerah, serta melalui observasi langsung terhadap kondisi lapangan, termasuk sarana, prasarana, dan penggunaan aset pendukung pelayanan kesehatan. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan telaah dokumen administratif, laporan, serta arsip resmi yang berkaitan dengan pengelolaan aset di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan.

Validasi Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Proses analisis dilakukan melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, pengelompokan informasi yang sejenis, penyusunan pola, pemilihan data yang penting, hingga penarikan kesimpulan yang sistematis dan mudah dipahami. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, serta triangulasi metode melalui penggunaan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.

3. HASIL

Karakteristik Informan

Berdasarkan tabel karakteristik informan, enam informan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria sebagai informan kunci, utama, dan pendukung, serta seluruhnya telah menandatangani informed consent. Informan kunci (IF1) adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan. Informan utama terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (IF2) serta pejabat BPKAD Kabupaten Asahan (IF3) yang memahami aspek administrasi, kepegawaian, keuangan, dan

pengelolaan aset daerah. Informan pendukung (IF4–IF6) meliputi perwakilan Inspektorat Daerah, Kepala Puskesmas, dan Pengurus Barang Puskesmas yang memberikan perspektif terkait pengawasan, pelaksanaan pelayanan kesehatan, serta pengelolaan sarana prasarana di tingkat fasilitas. Keberagaman jabatan dan pengalaman kerja para informan memungkinkan triangulasi data sehingga hasil penelitian menjadi lebih komprehensif dan akurat.

Sistem Pengendalian yang Ada Terhadap Barang Milik Daerah Dengan Aplikasi Simda Di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci, utama, dan pendukung (IF1–IF6), sistem pengendalian BMD melalui aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan Puskesmas dinilai cukup efektif. SIMDA memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan aset secara elektronik sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mempermudah pengawasan oleh Dinas Kesehatan, BPKAD, dan Inspektorat. Secara umum, pengendalian BMD telah berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku [16,17].

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan SDM, ketidaksinkronan data, serta perlunya pelatihan dan evaluasi rutin agar pencatatan lebih konsisten. Monitoring dilakukan melalui laporan berkala, koordinasi lintas unit, serta audit dan rekomendasi perbaikan dari BPKAD dan Inspektorat. Secara keseluruhan, sistem pengendalian BMD berbasis SIMDA telah mendukung akuntabilitas pengelolaan aset, namun tetap memerlukan peningkatan kapasitas dan penguatan koordinasi.

Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Dengan Aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Sub Bagian Umum, BPKAD, Inspektorat, Kepala Puskesmas, dan Pengurus Barang, mekanisme pengelolaan BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan telah berjalan sesuai prosedur dan menggunakan aplikasi SIMDA. Proses dimulai dari penerimaan dan verifikasi barang, pencatatan dalam SIMDA, penyimpanan sementara, hingga pendistribusian dan pemanfaatan di unit kerja atau Puskesmas. Seluruh tahapan dicatat dan dipantau secara berkala agar data aset tetap akurat dan akuntabel [18].

Pengelolaan melibatkan Sub Bagian Umum, pengurus barang, Kepala Puskesmas, staf administrasi, serta pengawasan dari Dinas Kesehatan. BPKAD berperan dalam verifikasi, monitoring, dan pembinaan teknis sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, sedangkan Inspektorat melakukan audit rutin untuk memastikan kepatuhan. Di tingkat Puskesmas, barang yang diterima diverifikasi, dicatat, dimanfaatkan untuk pelayanan, dan dilaporkan secara berkala. Secara umum, pengelolaan BMD melalui SIMDA telah berjalan baik dan terkoordinasi, meskipun masih terdapat temuan administratif minor terkait sinkronisasi data antara sistem dan kondisi fisik di lapangan.

Prosedur Pencatatan Barang Milik Daerah Dengan Aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (IF1–IF6), prosedur pencatatan BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan Puskesmas telah dilaksanakan secara sistematis melalui aplikasi SIMDA. Setiap barang yang diterima diverifikasi berdasarkan dokumen pendukung, kemudian diinput ke dalam SIMDA mencakup jenis, jumlah, nilai, kondisi, dan lokasi. Mutasi, pemindahan, dan penghapusan aset juga dicatat dalam sistem dengan persetujuan berjenjang serta validasi dari pengurus barang dan BPKAD. Pelaporan dilakukan secara triwulanan dan tahunan, serta diaudit oleh Dinas Kesehatan dan Inspektorat untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi fisik [18]. Adapun kendala yang masih dihadapi meliputi keterbatasan SDM, keterlambatan pembaruan data, dan ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi antarunit, serta penyempurnaan sistem SIMDA agar lebih efektif, terintegrasi, dan mudah digunakan. Secara umum, penerapan SIMDA telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, meskipun masih memerlukan optimalisasi.

4. PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian yang Ada Terhadap Barang Milik Daerah Dengan Aplikasi Simda Di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan (IF1–IF7), sistem pengendalian BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan Puskesmas dinilai cukup efektif melalui penggunaan aplikasi SIMDA. SIMDA memudahkan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan aset sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas,

dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Prosedur yang diterapkan telah sesuai dengan regulasi dan pedoman BPKAD serta ketentuan pemerintah daerah, termasuk penerapan SOP mulai dari verifikasi, inventarisasi, hingga pelaporan dan audit. Di tingkat Puskesmas, SIMDA membantu inventarisasi, pelacakan mutasi, dan penyusunan laporan secara lebih sistematis dan mudah diaudit. Efektivitas sistem juga didukung oleh pelatihan dan pendampingan teknis untuk meningkatkan kompetensi SDM. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan kemampuan operator, ketidaksesuaian data sistem dengan kondisi fisik, serta keterlambatan pembaruan data.

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan SIMDA mampu meningkatkan akurasi dan akuntabilitas pengelolaan aset, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, koordinasi lintas unit, serta integrasi sistem yang optimal [19,20]. Secara keseluruhan, kombinasi penerapan SIMDA, kepatuhan regulasi, dan peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengendalian BMD yang efektif dan akuntabel [21,22].

Mekanisme Pengelolaan Barang Milik Dengan Aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Tahun 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMD telah dilaksanakan secara sistematis dan berbasis digital melalui aplikasi SIMDA, sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Proses pengelolaan dimulai dari penerimaan, verifikasi, pencatatan, penyimpanan, distribusi, pemanfaatan, hingga pelaporan yang seluruhnya terdokumentasi dalam sistem, sehingga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas [23]. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan, BPKAD melakukan verifikasi serta pembinaan teknis, sedangkan Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan melalui audit rutin dan tematik [9,10]. Koordinasi antarunit telah berjalan cukup baik, meskipun monitoring masih perlu ditingkatkan secara berkala, misalnya setiap triwulan, agar pembaruan data lebih konsisten.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan kompetensi SDM, ketidaksesuaian antara data digital dan kondisi fisik aset, serta kurang optimalnya pelatihan dan pembaruan sistem [24]. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa efektivitas SIMDA sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM, kedisiplinan pembaruan data, dan penguatan koordinasi lintas instansi [25]. Secara umum, implementasi SIMDA di sektor kesehatan Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah [26].

Prosedur Pencatatan Barang Milik Daerah Dengan Aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan tahun 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prosedur pencatatan BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan telah dilaksanakan secara sistematis melalui SIMDA, mulai dari verifikasi dokumen saat penerimaan, input data (jenis, jumlah, nilai, kondisi, lokasi), hingga pencatatan mutasi, pemindahan, dan penghapusan dengan persetujuan berjenjang. Pelaporan dilakukan secara triwulanan dan tahunan serta diaudit untuk memastikan kesesuaian antara data sistem dan kondisi fisik. Prosedur ini telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan pedoman BPKAD, serta mencerminkan tertib administrasi dan penguatan pengendalian internal.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kompetensi SDM, keterlambatan pembaruan data, ketidaksesuaian antara data digital dan kondisi fisik, serta integrasi data lama yang belum optimal [27]. Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi aset sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM, integrasi sistem, dan infrastruktur pendukung [28,29]. Secara keseluruhan, mekanisme pencatatan BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan menunjukkan kemajuan signifikan menuju pengelolaan aset yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis prinsip good governance, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan konsistensi pelaksanaan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pengendalian dan pengelolaan BMD melalui aplikasi SIMDA di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan telah berjalan cukup efektif dan sesuai dengan SOP serta regulasi yang berlaku, didukung oleh monitoring BPKAD dan audit Inspektorat. Mekanisme pengelolaan telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari penerimaan, verifikasi, pencatatan, distribusi, hingga pelaporan dengan pembagian peran yang jelas antarunit. Prosedur pencatatan juga telah memenuhi standar administrasi melalui verifikasi dokumen, input data, pencatatan mutasi atau penghapusan, serta pelaporan berkala. Namun demikian, efektivitas

pelaksanaan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi SDM, ketidaksinkronan data antara sistem dan kondisi fisik, keterlambatan pembaruan data, serta integrasi data lama yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas operator, penguatan koordinasi, serta evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala agar pengelolaan BMD semakin akurat, transparan, dan akuntabel.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang maha esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan dan Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam yang sudah mewadahi peneliti sehingga dapat menghasilkan publikasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andry, Hendry; Herman, Herman; Rahmah, Junaini. Pelaksanaan Koordinasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pekanbaru Dalam Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Operasional Khusus (Ambulance). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 2023, 12.1: 18-28.
- [2] DANGA, Yuliyanti Rambu Yaku; LEDE, Pingky Alfa Ray Leo; MIRA, Trisari Dewi Novyanti Bertha. Sistem Informasi Inventaris Barang Berbasis Web pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur. In: *Prosiding Seminar Nasional SATI*. 2023. p. 144-158.
- [3] Entjaurau, Marlin Anjels; GELATAN, Longginus. Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 2023, 7.1: 47-67.
- [4] Hidayat, M., & Nuraini, L. (2022). Meta-Analysis on the Influence of Information Systems and Human Resources on Regional Asset Management Effectiveness. *International Journal of Business Management and Economic Research (IJBMER)*.
- [5] Hutagalung, M. (2023). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, 11(3), 210–222.
- [6] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [7] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [8] Kumalasari, Indah; SITINJAK, Norman Duma; PARAWIYATI, Parawiyati. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah (Studi Pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2025, 2.2: 1035-1043.
- [9] Kurniawan, H., & Lestari, N. (2025). Good Governance Implementation in Fixed Asset Management. *International Journal of Finance and Management Research (IJFMR)*.
- [10] Lubis, R. (2022). Implementasi Aplikasi SIMDA Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kebijakan Publik dan Manajemen*, 10(1), 55–66.
- [11] Machmud, Yasir Susanto, et al. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN ASET PERUSAHAAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN. 2023. PhD Thesis. Universitas Hasanuddin.
- [12] MG, Bernafus Adito; DEMU, Yohanes; MUGA, Maria PL. MANAJEMEN ASET BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PLEDO KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR. *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 2022, 10.1: 58-66.
- [13] Marzuq, Naufal Hilmi; ANDRIANI, Helen. Hubungan service quality terhadap kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan: literature review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022, 6.2: 13995-14008.
- [14] Murdana, I. Wayan; ALEXANDER, Stanly W.; MAWIKERE, Lidia M. Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Pada PT Buana Finance Tbk Cabang Manado: Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 2023, 6.2: 1147-1156.
- [15] Nasution, Dicky Muhammad Rahim. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. 2024. PhD Thesis. Universitas Sumatera Utara.

- [16] Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Aset Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [17] Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- [18] Periansya, Periansya; NURHIDAYATI, Nurhidayati; MUBAROK, M. Husni. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Aparatur Terhadap Penyerapan Anggaran Dengan Perantara Komitmen Pimpinan. *Jurnal E-Bis*, 2022, 6.2: 526-542.
- [19] Putri, Retno Adhilla; MANNAS, Yussy Adelina. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *UNES Law Review*, 2025, 7.3: 1108-1121.
- [20] Putri, R. A. (2025). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Sektor Kesehatan Kabupaten Asahan. *Jurnal Manajemen Publik dan Keuangan Daerah*, 13(1), 101–115.
- [21] Pratama, B. (2024). Regional Asset Management and Corruption Prevention Framework in Local Governments. *EJ-Politics.org*.
- [22] Rahman, A., & Sari, D. (2021). Analysis of Regional Asset Management System in West Sulawesi Province. *Quest Journals*.
- [23] Santoso, R., & Wulandari, T. (2023). Developing Smart Asset Management in Local Government. *Journal of Universitas Airlangga*.
- [24] Sari, Yolanda; Winarni, Etik; AMALI, Muhammad. Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Belanja Modal Di Provinsi. Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2021, 5.2: 565-571.
- [25] Siregar, D. (2021). Analisis Pengelolaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Pemerintah Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 145–158.
- [26] Zihni, Farhan; Permana, Wahyu. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi, terhadap pengelolaan keuangan berkonsep value for money pada pemerintah di kabupaten dairi. *Prosiding fakultas ilmu sosial ilmu politik universitas dharmawangsa*, 2022, 2: 13-25.
- [27] Di Harjo FF, Desfina D. Analisis Penerapan Aplikasi SIMDA BMD Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Guna Memaksimalkan Pemanfaatan Aset Daerah: Studi Kasus BKAD Kabupaten Bintan. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika Dan Jaringan*. 2024 Apr 2;2(2):20-6.
- [28] Kuntoro S, Suseno G. Obstacles and Solutions in the Digitalization of Public Services in Developing Countries: Hambatan dan Solusi dalam Digitalisasi Layanan Publik di Negara Berkembang. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*. 2024 May 13;1(1):31-48.
- [29] Zahwa MF, Fatturahman AP, Rabbany N, Arianti NI, Mawar M. Studi Komparatif Penerapan Inovasi Digital dalam Layanan Kesehatan (Kajian atau Tinjauan Pemanfaatan Data dan Telemedicine di Indonesia dan Thailand). *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*. 2025 Jul 5;1(03):581-95.